

**PENATAUSAHAAN BARANG MILIK PERUSAHAAN  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA  
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

**Disusun Oleh :**

**Nama : MUAMMAR IRSYAD**  
**NPM : 2143021019**  
**JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK**  
**PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA**  
**KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA**

**Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar  
Magister Terapan Administrasi Publik (M. Tr. A.P)**



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
PROGRAM MAGISTER TERAPAN  
TAHUN 2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

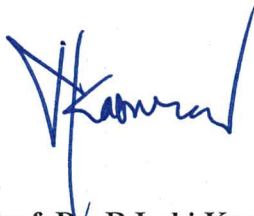
Nama : MUAMMAR IRSYAD  
NPM : 2143021019  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara  
Judul Tesis : Penatusahaan Barang Milik Perusahaan pada Badan Usaha  
Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Pembangunan  
Sarana Jaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

*Administration Of Company Property In Regionally Owned  
Enterprises, Regional Public Company Pembangunan Sarana  
Jaya, Dki Jakarta Provincial Government*

Diterima dan Disetujui untuk dipertahankan

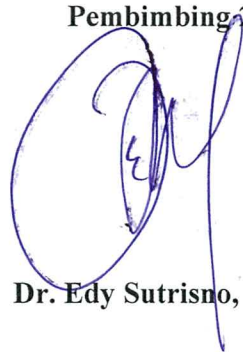
Pembimbing Tesis

**Pembimbing 1**



**Prof. Dr. R Luki Karunia,  
S.E.,Ak. MA CA.CACP**

**Pembimbing 2**



**Dr. Edy Sutrisno, M.Si**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : Muammar Irsyad  
NPM : 2143021019  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara  
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Penatusahaan Barang Milik Perusahaan pada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 07 November 2024  
Pukul : 08.00 s.d 09.30 WIB

**TELAH DINYATAKAN LULUS**

**PENGUJI TESIS :**

Ketua Sidang : Dr. Bambang Giyanto, M.Pd  
Sekretaris : Dr. Asropi, M.Si  
Anggota : Dr. Achmad Djatmiko, MA  
Pembimbing 1 : Prof. Dr. R Luki Karunia, MA : .....  
Pembimbing 2 : Dr. Edy Sutrisno, M.Si : .....



## SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muammar Irsyad  
NPM : 2143021019  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul **“Penatausahaan Barang Milik Perusahaan pada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Jakarta, 07 November 2024



Muammar Irsyad

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul “PENATAUSAHAAN BARANG MILIK PERUSAHAAN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA”.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Manajemen Keuangan Negara Khususnya pada Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Perusahaan di Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Penyusunan tesis ini, Peneliti banyak mendapat bimbingan dan petunjuk dari Bapak Prof. Dr. R Luki Karunia, S.E,Ak. MA CA.CACP dan Bapak Dr. Edy Sutrisno, M.Si sebagai Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran dan dedikasi untuk selalu membimbing Peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. Kami sangat menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat Kami harapkan untuk kesempurnaan dari kekurangan – kekurangan yang ada, sehingga tesis ini dapat bermanfaat.

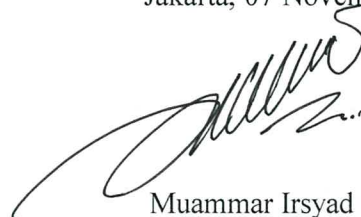
Akhir Kata, Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu Kami dalam penyusunan tesis ini, terkhusus kepada:

1. Ibu Prof. Nurliah Nurdin selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta
2. Bapak Ir. Andira Reoputra, ST, DIPL MAURP IPU selaku Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Provinsi DKI Jakarta.
3. Bapak Dr. Bambang Giyanto, M.Pd selaku Dosen Penguji I yang telah telah memberikan masukan dan saran yang baik dalam tesis saya.
4. Bapak Dr. Asropi, M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah telah memberikan masukan dan saran yang baik dalam tesis saya.
5. Bapak Dr. Achmad Djatmiko, MA selaku Dosen Penguji III yang telah telah memberikan masukan dan saran yang baik dalam tesis saya.

6. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) kampus yang senantiasa membantu proses administrasi dengan baik.
7. Rekan – Rekan Divisi SDM, Umum & Aset yang telah membantu dan memberikan dukungan dari awal hingga selesainya penelitian ini.
8. Teristimewa dan terkasih kedua orang tua tercinta, mama, Bapak serta kakak kandung peneliti Silmy Fitria yang sudah memberikan kasih sayang, semangat, waktu dan doa serta dukungan moril dan materil selama penelitian berlangsung.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Konsentrasi Manajemen Keuangan Negara Angkatan 2021 yang telah memberikan sumbangan pikiran dan motivasi kepada Peneliti sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan pengorbanan yang telah mereka berikan kepada Kami. Serta terlimpah Rahmat dan Karunia Nya kepada Kita semua. Amiiin ya Robbal Alamin.

Jakarta, 07 November 2024



Muammar Irsyad

## ABSTRAK

### **PENATAUSAHAAN BARANG MILIK PERUSAHAAN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

<sup>1</sup>Muammar Irsyad, <sup>2</sup>Luki Karunia, <sup>3</sup>Edy Sutrisno  
muammar.irsyad1997@gmail.com

Perumda Pembangunan Sarana Jaya Provinsi DKI Jakarta

Perumda Pembangunan Sarana Jaya masih kesulitan dalam mengelola barang milik perusahaan, karena aset berpindah-pindah dari satu ruangan ke ruangan lain, tidak ada kartu inventaris ruangan, pelaporan yang tidak konsisten, dan sumber daya manusia yang mengelola barang masih kurang. Penelitian ini meneliti bagaimana Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi DKI Jakarta mengelola barang milik perusahaan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan pemeriksaan dokumen. Penelitian ini akan menggunakan pengumpulan, reduksi, display, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan penyebab belum efektif Penatausahaan barang milik Perusahaan ada 4 (empat) faktor yaitu: (1) Sumber Daya Manusia, (2) Dasar Hukum, (3) Penilaian Aset dan (4) Komitmen Pimpinan terhadap permasalahan penatausahaan barang milik Perusahaan dilihat dari (1) Pembukuan yang dilakukan oleh pengurus barang belum dilakukan dengan baik, dikarenakan belum adanya Penggolongan barang yang baku / standar, Kodefikasi barang yang berbeda setiap tahunnya yang menyebabkan sulitnya untuk mengidentifikasi barang dan belum adanya standarisasi baku Kartu Inventaris Ruangan sehingga belum adanya data tercatat pada ruangan. (2) Inventarisasi belum dilakukan dengan baik dikarenakan Belum adanya alur proses yang jelas. Selain itu, adanya barang rusak namun belum dilakukan penghapusan aset, ketiga terdapat regulasi yang sudah tidak relevan terhadap SK Organisasi Tata Kerja yaitu SK Tim Penghapusan dan Pengurus Barang yang membuat Penghapusan barang menjadi terhambat dan Dokumen inventarisasi yang berbeda – beda antara Divisi SDM dan Umum dan Divisi Keuangan sehingga sulit untuk dilakukan dalam satu pelaporan. (3) Pelaporan belum dilakukan dengan baik, dimana pengurus barang tidak membuat laporan semesteran dan tahunan serta tidak ada standar yang seragam dan baku;

**Kata Kunci :** Penatausahaan, Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan.

## ABSTRACT

### MANAGEMENT OF COMPANY PROPERTY IN REGIONAL-OWNED ENTERPRISE ENTITY PUBLIC COMPANY OF DEVELOPMENT SARANA JAYA OF DKI JAKARTA PROVINCE GOVERNMENT

<sup>1</sup>Muammar Irsyad, <sup>2</sup>Luki Karunia, <sup>3</sup>Eddy Sutrisno  
muammar.irsyad1997@gmail.com

Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta Province

Perumda Pembangunan Sarana Jaya still has difficulty in managing company assets, because assets move from one room to another, there are no room inventory cards, inconsistent reporting, and human resources managing assets are still lacking. This study examines how the Regional Public Company Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya of DKI Jakarta Province manages company assets.

This study uses a qualitative method. Data were collected through interviews, observations, and document examinations. This study will use collection, reduction, display, and drawing conclusions.

The results of the study indicate that the causes of the ineffectiveness of the Company's asset management are 4 (four) factors, namely: (1) Human Resources, (2) Legal Basis, (3) Asset Assessment and (4) Leadership Commitment to the problem of managing Company assets seen from (1) Bookkeeping carried out by the asset manager has not been carried out properly, due to the absence of a standard / standard classification of goods, different codification of goods each year which makes it difficult to identify goods and the absence of standardization of Room Inventory Cards so that there is no recorded data in the room. (2) Inventory has not been carried out properly because there is no clear process flow. In addition, there are damaged goods but the asset has not been written off, thirdly there are regulations that are no longer relevant to the Decree on the Organizational Work Procedures, namely the Decree on the Deletion Team and the Goods Manager which makes the Deletion of goods hampered and the inventory documents are different between the HR and General Divisions and the Finance Division so that it is difficult to do in one report. (3) Reporting has not been carried out properly, where the goods manager does not make semester and annual reports and there are no uniform and standard standards;

**Keywords:** Administration, Bookkeeping, Inventory, Reporting.

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| LEMBAR JUDUL .....   | i    |
| LEMBAR PERSETUJUAN.....  | ii   |
| PERNYATAAN PENGESAHAN .....  | iii  |
| LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS .....   | iv   |
| KATA PENGANTAR .....   | v    |
| ABSTRAK .....  | vii  |
| ABSTRACT .....   | viii |
| DAFTAR ISI .....   | ix   |
| DAFTAR TABEL .....   | xii  |
| DAFTAR GAMBAR.....   | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1    |
| A. Latar Belakang .....  | 1    |
| B. Identifikasi Masalah.....   | 10   |
| C. Rumusan Permasalahan .....  | 11   |
| D. Tujuan Penelitian.....  | 12   |
| E. Manfaat Penelitian .....  | 12   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....  | 13   |
| A. Penelitian Terdahulu.....   | 13   |
| B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis.....  | 20   |
| 1. Tinjauan Kebijakan.....   | 20   |
| a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan<br>Negara .....                                | 20   |
| b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan<br>Daerah.....                             | 21   |
| c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang<br>Pengelolaan Keuangan Daerah.....              | 23   |
| d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar<br>Akuntansi Pemerintahan .....          | 24   |
| e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang<br>Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah ..... | 24   |

|   |    |
|---|----|
| f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024<br>Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.....  | 25 |
| g. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2018<br>Tentang Perumda Pembangunan Sarana Jaya ..... | 26 |
| 2. Tinjauan Teoritis.....   | 28 |
| a. Administrasi.....  | 28 |
| b. Administrasi Publik .....  | 29 |
| c. Paradigma Administrasi Publik .....  | 31 |
| d. Keuangan Negara.....   | 33 |
| e. Manajemen Keuangan Negara.....   | 35 |
| f. Manajemen Aset.....  | 37 |
| g. Pengertian Aset Tetap .....  | 39 |
| h. Pengelolaan Aset.....  | 41 |
| i. Sistem Informasi Inventarisasi Aset .....  | 43 |
| j. <i>Good Corporate Governance</i> .....   | 43 |
| k. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) .....  | 44 |
| l. Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan oleh BUMD.....  | 46 |
| m. Upaya BUMD dalam Mengelola Kekayaan Daerah.....  | 51 |
| n. Penatausahaan.....   | 55 |
| o. Faktor – Faktor Penatausahaan.....   | 58 |
| p. Faktor Sumber Daya Manusia .....   | 59 |
| q. Faktor Dasar Hukum.....  | 60 |
| r. Faktor Penilaian Aset.....   | 60 |
| s. Faktor Komitmen Pimpinan.....  | 61 |
| C. Kerangka Berpikir .....  | 61 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....   | 64 |
| A. Metode Penelitian.....   | 64 |
| B. Teknik Pengumpulan Data.....   | 65 |
| C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....  | 69 |
| D. Instrumen Penelitian.....  | 70 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN.....  | 73 |
| A. Deskripsi Objek Penelitian .....   | 73 |
| B. Hasil dan Analisis Penelitian .....  | 78 |

|   |     |
|---|-----|
| 1. Faktor – Faktor yang berpengaruh terhadap Penatusahaan di Perumda Pembangunan Sarana Jaya..... | 79  |
| a. Faktor Sumber Daya Manusia.....  | 79  |
| 1). Pembukuan.....  | 79  |
| 2). Inventarisasi.....  | 86  |
| 3). Pelaporan.....  | 95  |
| b. Faktor Dasar Hukum.....  | 96  |
| 1). Pembukuan.....  | 96  |
| 2). Inventarisasi.....  | 101 |
| 3). Pelaporan.....  | 112 |
| c. Faktor Penilaian Aset.....   | 113 |
| 1). Pembukuan.....  | 114 |
| 2). Inventarisasi.....  | 117 |
| 3). Pelaporan.....  | 122 |
| d. Faktor Komitmen Pimpinan.....  | 124 |
| 1). Pembukuan.....  | 124 |
| 2). Inventarisasi.....  | 127 |
| 3). Pelaporan.....  | 131 |
| 2. Solusi Pembahasan dan Strategi.....  | 133 |
| BAB V PENUTUP DAN KESIMPULAN.....   | 174 |
| A. Kesimpulan.....  | 174 |
| B. Saran.....   | 177 |
| DAFTAR PUSTAKA.....   | 180 |
| LAMPIRAN.....   | 184 |

## DAFTAR TABEL

|  |     |
|--|-----|
| Tabel 1.1 Jumlah SDM Sarana Jaya .....                     | 9   |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....                       | 17  |
| Tabel 3.1 Informan Penelitian .....                        | 66  |
| Tabel 4.1 Tabel Pengurus Barang .....                      | 85  |
| Tabel 4.2 Rekomendasi Kode Golongan Barang/Aset .....      | 134 |
| Tabel 4.3 Kodefikasi / Penomoran Barang Inventaris .....   | 136 |
| Tabel 4.4 Daftar/Kartu Inventaris Ruangan .....            | 145 |
| Tabel 4.5 Daftar Inventaris Barang.....                    | 160 |
| Tabel 4.6 Data Dokumen Kepemilikan Tanah .....             | 162 |
| Tabel 4.7 Data Gedung dan Bangunan .....                   | 163 |
| Tabel 4.8 Data Inventaris Barang Peralatan dan Mesin ..... | 163 |
| Tabel 4.9 Data Kepemilikan Kendaraan Dinas .....           | 171 |
| Tabel 4.10 Data Aset Tak Berwujud .....                    | 171 |
| Tabel 4.11 Data Aset Lainnya.....                          | 172 |
| Tabel 4.12 Rincian Data Keseluruhan Nilai Barang/Aset..... | 172 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |     |
|---|-----|
| Gambar 1.1 Laporan Posisi Keuangan Sarana Jaya .....                | 4   |
| Gambar 1.2 LKA Perumda Pembangunan Sarana Jaya .....                | 5   |
| Gambar 1.3 Kondisi Barang Rusak.....                                | 6   |
| Gambar 1.4 Tidak adanya Daftar Inventaris Ruangan .....             | 7   |
| Gambar 1.5 Kodefikasi Barang.....                                   | 8   |
| Gambar 2.1 Model Penelitian Penatausahaan.....                      | 63  |
| Gambar 4.1 Gedung Sarana Jaya Pusat .....                           | 73  |
| Gambar 4.2 SOTK Sarana Jaya .....                                   | 76  |
| Gambar 4.3 Daftar Inventaris Kantor Pusat.....                      | 80  |
| Gambar 4.4 Kodefikasi Barang/Penomoran Barang.....                  | 80  |
| Gambar 4.5 Daftar Inventaris Barang Dokumentasi Observasi.....      | 83  |
| Gambar 4.6 Surat Tugas Sensus Aset.....                             | 87  |
| Gambar 4.7 Surat Tugas Sensus Aset.....                             | 101 |
| Gambar 4.8 Kondisi Barang Rusak.....                                | 104 |
| Gambar 4.9 SK Direksi Panitia Penghapusan Aset .....                | 106 |
| Gambar 4.10 SK Direksi Pengurus Barang .....                        | 108 |
| Gambar 4.11 Observasi Dokumen Keuangan .....                        | 121 |
| Gambar 4.12 Draft Rekomendasi SK Direksi 14 Tahun 2020 .....        | 152 |
| Gambar 4.13 Draft Rekomendasi SK Direksi 15 Tahun 2020 .....        | 154 |
| Gambar 4.14 Draft Rekomendasi Berita Acara Penghapusan Barang ..... | 157 |

# **BAB 1**

## **PERMASALAHAN PENELITIAN**

### **1. Latar Belakang**

Saat tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19, yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang memberikan panduan operasional mengenai pengelolaan aset daerah. Dalam peraturan ini, pemerintah daerah diminta untuk segera merancang dan menerapkan sistem pengaturan untuk mencatat, menginventarisasi, dan melaporkan aset-aset yang dimiliki oleh daerah tersebut. Tujuannya adalah supaya pemerintah daerah bisa menyusun neraca keuangan daerah dan melaporkan penggunaan anggaran dengan akurat. Dalam rangka mengikuti ketentuan Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang telah mengalami perubahan menjadi Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, diperlukan pengawasan yang efektif dan kerjasama yang kompeten dalam menjalankan proses pencatatan aset di tingkat SKPD dan manajemen barang milik daerah dengan cermat. Dengan demikian, diperlukan ketegasan komitmen dari pimpinan dalam mengurus aset daerah berdasarkan penjelasan tersebut (Patontongan Sari, 2020).

Patontongan (2020) menambahkan bahwa Penatausahaan barang milik negara/daerah bertujuan untuk melaksanakan implementasi *Good Governance*. Evaluasi kesehatan sebuah instansi pemerintahan tidak terbatas pada aspek fisik semata, seperti kondisi gedung, struktur, atau perkembangan fisiknya. Hal yang utama dalam mengamati kemajuan sebuah lembaga adalah bagaimana mereka mengelola barang milik negara atau aset yang mereka memiliki. Elemen yang tak dapat dipisahkan dalam manajemen dan pelaporan keuangan adalah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau instansi pemerintahan.

Lembaga yang dikenal sebagai Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang dijelaskan dalam Bagian Umum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018, telah ada dari tahun 1982. Saat awal berdiri, Sarana Jaya berfokus pada dukungan terhadap kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tujuan membangkitkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga tersebut melakukan berbagai kegiatan seperti penyediaan lahan, pembangunan perumahan, konstruksi bangunan umum, pengembangan kawasan industri, serta infrastruktur, dengan prinsip dasar bahwa mereka adalah badan usaha yang bertujuan mencapai laba, sesuai dengan sifat ekonomi perusahaan. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah memilih Sarana Jaya sebagai mitra untuk mengelola proyek-proyek penting di wilayah tersebut, termasuk mengurus pembangunan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang serta pembangunan rumah hunian dengan program *Down Payment* Rp.0,- (nol rupiah) ([www.sarana-jaya.co.id](http://www.sarana-jaya.co.id)).

Kebijakan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang jujur, efisien, terbuka, dan bertanggung jawab, serta layanan publik yang berkualitas dan dapat dipercaya, pertama kali dimulai sesuai dengan petunjuk dari Presiden dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Kemudian, kebijakan ini diperbarui dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government*. Pemerintahan Elektronik (*E-Government*) merujuk pada pelaksanaan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyediakan pelayanan kepada pemangku kepentingan sektor publik (SPBE). Pengguna layanan SPBE meliputi berbagai entitas, seperti instansi pemerintah pusat, pegawai Aparatur Sipil Negara di tingkat daerah, individu, masyarakat umum, pelaku usaha, dan pihak lain yang menggunakan layanan yang disediakan oleh SPBE.

Perumda (Perusahaan Umum Daerah) Pembangunan Sarana Jaya, yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah, tentu saja berusaha untuk implementasi asas-asas tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate*

*Governance*) sebagai langkah awal dalam usaha meningkatkan kinerja, performa, serta citra perusahaan. Implementasi Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) adalah landasan kunci dalam membangun BUMD yang sehat, kuat, efisien, dan berkualitas. Menerapkan GCG juga memiliki tujuan untuk meningkatkan manfaat yang diberikan kepada setiap orang yang terlibat dalam Sarana Jaya. Ini mencakup peningkatan kinerja perusahaan, perlindungan kepentingan stakeholder, mematuhi hukum yang berlaku, serta mempromosikan nilai-nilai etika yang umumnya berlaku dalam industri properti sebagai perusahaan milik daerah.

Aset atau barang adalah elemen penting dalam operasional suatu lembaga untuk menjalankan tugasnya dalam memberikan dukungan kepada masyarakat atau pihak terkait. Ironisnya, meskipun memiliki peran yang penting, seringkali aset tidak dikelola dengan cara yang transparan dan akuntabel. Padahal, pengelolaan dan pelaporan yang tepat terkait aset memiliki dampak besar terhadap integritas laporan keuangan. Kesalahan dalam menilai aset atau barang dapat menghasilkan kesalahan materiil yang cukup berarti karena nilai yang diinvestasikan dalamnya relatif besar (Suparman, et al, 2018).

Kementerian Dalam Negeri melaporkan aset BUMD sebesar 340,118 T hingga tahun 2011, dengan 310,716 T (90,06%) dari BPD, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp 11,454 triliun (3,3%), perusahaan air minum (PDAM) sebesar Rp 9,326 triliun (2,7%), dan aneka usaha sebesar Rp 11,622 triliun. Terdapat 1.007 BUMD yang terdiri dari bank umum (BPD), bank perkreditan rakyat (BPR), perusahaan daerah air minum (PDAM), dan aneka usaha. BUMD memberikan kontribusi laba sebesar Rp 10,372 triliun, atau ROA sebesar 3,0%. Kondisi di atas membuat keuntungan BUMD dari aset besar tidak seimbang. Kontribusi BUMD sebesar 3,0% terhadap seluruh aset cukup mengejutkan. (<http://www.depdagri.go.id/> cit Yudho et al, 2014).

Dalam dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, ada upaya pengelolaan aset yang mencakup penerapan sistem e-Sensus oleh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Melalui e-Sensus ini, informasi terkini mengenai status dan kondisi aset menjadi tersedia. Sistem ini digunakan untuk mencatat semua barang yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga data inventaris dapat disusun dengan tepat dan akurat. Selain itu, hal ini juga memungkinkan untuk akuntabilitas yang lebih baik bagi Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta (<https://aset.jakarta.go.id/esensus/>).

Gambar 1.1  
Laporan Posisi Keuangan  
Perumda Pembangunan Sarana Jaya

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)  
(in thousands of Rupiah, unless stated otherwise)


| Uraian<br>Description  | 2023                 | 2022                 | Pertumbuhan/(Penurunan) %<br>Increase/(Decrease) % |
|--|----------------------|----------------------|--|
| Aset Lancar<br>Current Assets                                      | 974.774.951          | 968.086.515          | 1  |
| Aset Tidak Lancar<br>Non-Current Assets                            | 5.310.258.402        | 5.427.310.029        | (2)  |
| <b>Jumlah Aset</b><br>Total Assets                                 | <b>6.285.033.353</b> | <b>6.395.396.544</b> | <b>(2)</b>   |
| Liabilitas Jangka Pendek<br>Current Liabilities                    | 270.202.189          | 607.139.670          | (55)   |
| Liabilitas Jangka Panjang<br>Non-Current Liabilities               | 459.213.387          | 154.109.414          | 198  |
| <b>Jumlah Liabilitas</b><br>Total Liabilities                      | <b>729.415.576</b>   | <b>761.249.084</b>   | <b>(4)</b>   |
| <b>Jumlah Ekuitas</b><br>Total Equity                              | <b>5.555.617.776</b> | <b>5.634.147.460</b> | <b>(1)</b>   |
| <b>Jumlah Liabilitas &amp; Ekuitas</b><br>Total Liability & Equity | <b>6.285.033.353</b> | <b>6.395.396.544</b> | <b>(2)</b>   |

Sumber : Laporan Tahunan dan Konsolidasi Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2023.

Adapun dapat dilihat dari Jumlah total aset Perumda Pembangunan Sarana Jaya di tahun 2023 sebesar Rp6,3 triliun dengan Jumlah aset lancar sebesar Rp974,8 miliar di tahun 2023. Adapun Aset Tetap yang terdiri dari bangunan, inventaris, kendaraan, mesin dan peralatan yang dimiliki oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11,0 miliar dimana Perumda Pembangunan Sarana Jaya mengelola beberapa Aset yang dimilikinya yaitu diantaranya Menara Swasana, Cibubur Junction, Menara Kanaya, Gedung Sarana Jaya, Naya Cikini, Palma Citra, Pondok Kelapa Town Square (POKETS), Naya Pramuka, Kemari Menteng, Mall Ikan, Wang Residence Naya Menteng.

Dalam mengelola aset tersebut tentunya Perumda Pembangunan Sarana Jaya mempunyai tantangan tersendiri untuk bagaimana dilakukannya optimalisasi pada aset yang dikelola dan bagaimana penatausahaan barang milik Perusahaan di Lingkungan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dapat berjalan secara optimal dan dapat memberikan dampak yang positif bagi Perusahaan. Penyelenggaraan administrasi barang yang dimiliki oleh perusahaan ini masih menunjukkan banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan observasi dan informasi awal yang disampaikan oleh Bapak Dwi Ananto selaku General Manajer Divisi SDM dan Umum mengatakan bahwa sampai saat ini Inventarisasi / pencatatan aset belum dilakukan dengan baik diantaranya belum terdapat kartu inventaris ruangan dalam setiap ruangan, Barang Rusak yang tidak dilakukan penghapusan dan penggolongan, kodefikasi barang yang belum dibakukan dan diidentifikasi. Hal ini didukung oleh Data dari Hasil Pemeriksaan Auditor Manajemen Aset oleh ICM Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan dan mengeluarkan Hasil Ketidaksesuaian Audit (LKA) pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya khususnya di Divisi SDM dan Umum pada tanggal 25 Maret 2024 dapat dilihat Lembar Ketidaksesuaian Audit yang perlu dilakukan tindak lanjut di bawah ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.2**  
**Lembar Ketidaksesuaian Audit (LKA)**  
**Temuan Audit Eksternal Divisi SDM dan Umum**

|   |   |  |            |                |
|---|---|--|------------|----------------|
|  | LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT (LKA) dan OBSERVASI |  | Dokumen No | TC-SOP-01-F-69 |
|   |   |  | Revisi     | 00             |
|   |   |  | Tanggal    | 25 Maret 2024  |
|   |   |  | Halaman    | 25             |

| LEMBAR KETIDAKSESUAIAN AUDIT (LKA) |  |                |                                     |  |
|------------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|--|
| DIISI OLEH ICM INDONESIA           | DEPARTEMEN / PROSES/ LOKASI                      |                | DIVISI SDM & UMUM                   |  |
|                                    | STANDAR  |                | No. LKA                             |  |
|                                    | ISO 9001:2015 & ISO 55001:2014                   |                | 7.1.3, 7.1.5.1 & 9.1                |  |
|                                    | KETIDAKSESUAIAN – DESKRIPSI OBJECTIVE EVIDENCE : |                | Temuan diselesaikan sebelum tanggal |  |
|                                    | KATEGORI CAR                                     |                | 18 Juni 2024                        |  |
| AUDITOR                            |  | NPK, RI        |                                     |  |
| PERWAKILAN ORGANISASI              |  | Ananto, Ashari |                                     |  |

Sumber : Perumda Pembangunan Sarana Jaya. 2024

Bahwa berdasarkan Gambar 1.2 di atas tentang Lembar ketidaksesuaian Audit dan Temuan Audit Eksternal Divisi SDM dan Umum dijelaskan masih belum adanya update pencatatan penghapusan aset dan data rusak oleh Divisi SDM Dan Umum yang membuat terdapat barang rusak di ruang penyimpanan yang tidak kunjung dilakukan penghapusan. Tentu ini menjadi permasalahan yang perlu dilakukan perbaikan dan solusi di Perumda Pembangunan Sarana Jaya agar barang rusak dapat segera dilakukan penghapusan sehingga tidak menghabiskan ruang penyimpanan yang ada dan pengelolaan barang rusak berjalan dengan efektif.

Gambar 1.3  
Kondisi Barang Rusak  
Sumber : Dokumentasi Observasi



Bahwa berdasarkan Gambar 1.3 di atas tentang kondisi barang rusak dapat dilihat tentang bagaimana kondisi barang rusak di ruang penyimpanan barang yang seharusnya sudah dilakukan penghapusan barang namun sampai dengan saat ini permasalahan yang ada barang belum dapat dihapus dan terkendala atas SK Pengurus Barang dan SK Tim Panitia Penghapusan yang sudah tidak relevan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Temuan yang kedua atas Audit Eksternal di Perumda Pemabngunan Sarana Jaya sesuai dengan LKA yaitu belum adanya Daftar Inventarisasi Aset yang dilakukan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Atas Hal ini Penyebabnya adalah ketiadaan dasar / standar yang mengatur pencatatan dan penggunaan barang di Perumda Pembangunan Sarana Jaya sehingga pegawai merasa memiliki kebebasan untuk memindahkan barang dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Ketidakterediaan kartu inventaris ruangan (KIR) di setiap ruangan, yang seharusnya memberikan informasi mengenai jenis dan jumlah barang di dalamnya mengakibatkan kesulitan dalam mengendalikan barang-barang tersebut dan memastikan di ruangan mana barang-barang tersebut seharusnya berada. Selain itu, ketiadaan kartu pengawasan untuk barang yang dikeluarkan atau dipinjam oleh pegawai saat menjalankan tugas di lapangan dapat menyebabkan sulitnya mengetahui lokasi barang tersebut jika sudah berpindah tangan, dan akhirnya, keberadaan barang tersebut menjadi tidak pasti.

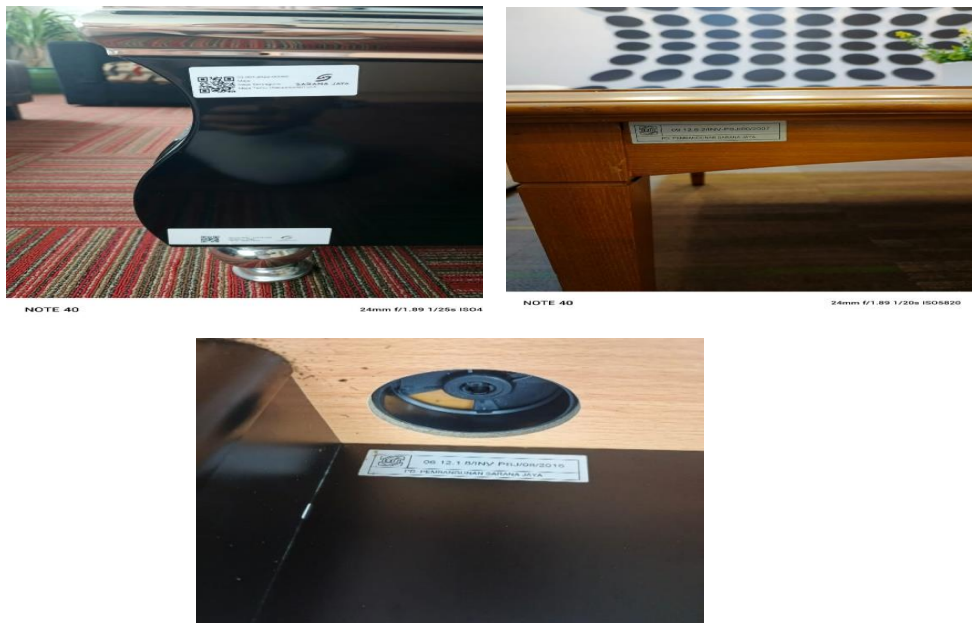
Gambar 1.4  
Tidak adanya Daftar Inventaris Barang  
Sumber : Dokumentasi Observasi



Temuan Ketiga oleh Auditor Eksternal ICM Indonesia adalah penggolongan, kode barang aset yang belum dibakukan dan diidentifikasi

menjadi permasalahan dikarenakan belum ada standar yang baku dan jelas untuk Penggolongan dan kode barang/aset di Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Penggolongan yang berbeda – beda setiap tahunnya dapat dilihat dari dokumentasi Observasi Peneliti di bawah berikut:

Gambar 1.5  
Kodefikasi Barang / Penomoran Barang  
Sumber : Dokumentasi Observasi



Bahwa sejalan dengan Atas temuan Audit Eksternal Perumda Pembangunan Sarana Jaya tersebut, Hal ini diperkuat pada Temuan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) berdasarkan Surat Nomor 2706/IA.02.01 kepada Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya perihal Penyampaian Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Pengawasan Internal atas Divisi SDM dan Umum atas temuan tidak adanya update data Barang/aset inventaris yang terekonsiliasi dengan Divisi Keuangan dan Akuntansi sehingga rekomendasi yang disampaikan oleh Satuan Pengawasan Internal adalah Divisi SDM dan Umum untuk melakukan pendataan dan monitoring kembali atas pemindahan barang yang ada pada ruangan Divisi dan SBU di Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Permasalahan selanjutnya dalam hal pengelolaan Barang Milik Perusahaan pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya ialah Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola barang milik perusahaan yang masih sangat kurang. Berikut informasi tentang Sumber Daya Manusia pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah SDM pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya Provinsi**  
**DKI Jakarta**

| No | Status Kepegawaian                         | Jumlah Pegawai |
|----|--|----------------|
| 1. | Pegawai BUMD                               | 133            |
| 2. | Pegawai yang mengurus Penatausahaan Barang | 1 Orang        |

Sumber : Perumda Pembangunan Sarana Jaya

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut, bahwa jumlah Pegawai dan pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya cukup banyak, namun dalam yang bertugas dalam melakukan penatausahaan barang hanya satu orang Pegawai saja dan itu belum berdasarkan SK Direksi untuk bertanggung jawab dalam hal pengelolaan Barang milik Perusahaan.. Hal lain yang juga membuat pengelolaan aset belum berjalan dengan baik disebabkan masih kurangnya pemahaman dari para Pegawai Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam pengelolaan aset disebabkan karena belum adanya diklat dan bimbingan teknis atau pelatihan terkait pengelolaan aset sehingga banyak Pegawai yang kurang memiliki kepedulian dan kesadaran dalam hal pengamanan barang milik perusahaan sehingga seringkali barang dalam satu ruangan mudah berpindah-pindah bahkan hilang entah kemana yang semestinya Ketika barang tersebut berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya harus ada bukti atau laporan yang menjelaskan tentang keberadaan barang tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan pada kondisi di atas tersebut, dalam pelaksanaan penatausahaan barang milik perusahaan, penulis bermaksud melakukan penelitian terhadap pelaksanaan Penatausahaan barang milik

perusahaan mengikuti dan melakukan *banchmarking* atas Pemendagri No. 19 Tahun 2016 Perubahan menjadi Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah karena Perumda Pembangunan Sarana Jaya perlu melakukan telaah Kebijakan terkait Peraturan administrasi untuk menghasilkan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, instruksi dan referensi yang tepat diperlukan untuk menyelesaikan tugas dengan baik dan menghindari kerugian. Tugas-tugas administrasi meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. (Dadang Suwanda, dkk. 223, 2022).

Pengelolaan barang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang dapat dilakukan secara efisien. Inventarisasi mengumpulkan, mencatat, dan melaporkan data barang. Inventarisasi menentukan jumlah, nilai, dan kondisi komoditas yang ada di penguasa dan pengelola barang. Pengelola dan pengguna juga melakukan sensus setiap lima tahun sekali untuk menghasilkan buku inventaris, buku induk inventaris, dan rekapitulasi komoditas. Pelaksanaan sensus berada di tangan pengelola (Dadang suwanda, dkk: 224-225, 2022) dimana atas referensi tersebut menjadi potensi yang sangat besar untuk dapat dilakukan dan diimplementasikan menjadi pengembangan di Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam rangka optimalisasi Aset BUMD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari uraian di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan Penelitian yang berjudul yaitu **“Penatausahaan Barang Milik Perusahaan Pada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Belum adanya penelitian terkait faktor - faktor yang mempengaruhi Penatausahaan Barang Milik Perusahaan di Badan Usaha Milik Daerah Perumda Pembangunan Sarana Jaya Pemprov DKI Jakarta.
2. Pelaksanaan Penatausahaan Pembukuan di Sarana Jaya belum dilakukan dengan baik dikarenakan permasalahan Penggolongan

barang/aset, Kodefikasi barang/aset dan Daftar Inventaris Ruangan yang belum teridentifikasi sehingga perlu dilakukan pemetaan solusi untuk mengatasi faktor penghambat dalam keberhasilan Penatausahaan aspek Pembukuan Barang Milik Perusahaan mengikuti regulasi Pengelolaan Aset yang berlaku.

3. Pelaksanaan aspek Inventarisasi belum dilakukan dengan baik dimana belum adanya penghapusan barang rusak, SK Direksi Tim Penghapusan & Pengurus Barang yang belum direvisi dan belum terintegrasi Data Penatausahaan antara Data Keuangan dan Data Divisi SDM & Umum sehingga perlu dilakukan pemetaan solusi mengatasi faktor penghambat untuk keberhasilan Penatausahaan aspek Inventarisasi Barang Milik Perusahaan mengikuti regulasi Pengelolaan Aset yang berlaku.
4. Pelaksanaan Pelaporan pada Penatausahaan yang belum memiliki standar baku sehingga perlu dilakukan pemetaan solusi mengatasi faktor penghambat tersebut untuk keberhasilan Penatausahaan aspek Pelaporan Barang Milik Perusahaan mengikuti regulasi Pengelolaan Aset yang berlaku.

### **C. Rumusan Permasalahan**

1. Faktor – Faktor apa saja yang berpengaruh dalam melakukan Penatausahaan Barang Milik Perusahaan pada Badan Usaha Milik Daerah Perumda Pembangunan Sarana Jaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ?
2. Bagaimana Solusi mengatasi faktor penghambat untuk keberhasilan Penatausahaan Barang Milik Perusahaan di Badan Usaha Milik Daerah Perumda Pembangunan Sarana Jaya ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk Menyusun Kajian Penatausahaan Barang Milik Perusahaan pada Badan Usaha Milik Daerah Perumda Pembangunan Sarana Jaya Pemprov DKI Jakarta yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi Penatausahaan Barang Milik Perusahaan pada BUMD Perumda Pembangunan Sarana Jaya Pemprov DKI Jakarta.
2. Mencari solusi Penatausahaan Barang Milik Perusahaan di Badan Usaha Milik Daerah Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademik

Hasil dari Penelitiann ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pengembangan dan Pengetahuan mengenai Penatausahaan Barang Milik Perusahaan. Disamping itu pula Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan evaluasi terhadap pimpinan Perusahaan kemudian untuk para pengelola barang milik Perusahaan khususnya yang ada di Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan dalam Penatausahaan Barang Milik Perusahaan.